



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp. / Fax (0414) 21070 Benteng

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 02/I/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali



dan reakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.



d. Membantu PPK dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah T.A 2024;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku maka keputusan Bupati Nomor : 09/I/Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 02 Januari 2024

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPELITBANGDA,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

Tembusan ddh Kepada :

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten di Benteng.



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 02/I/TAHUN 2024
TANGGAL 02 JANUARI 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat Daerah			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MUHAMMAD HARYRUSTAMAN, S.E. NIP. 19810925 201001 1 014	Kasubag. Program	PPTK

NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SALAWATI, S.E. NIP.19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	SALAWATI, S.E. NIP.19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SALAWATI, S.E. NIP.19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SALAWATI, S.E. NIP.19721215 201001 2 004	Kasubag. Keuangan	PPTK
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
4.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK



NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
2.	Pemeliharaan Mebel	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
4.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NUR AMINAH, S.E., M.M. NIP.19740601 200903 2 001	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	PPTK
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
2.	Koordinasi Penelaahaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
5.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK



NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
6.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
2.	Pembinaan dan Pemamfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dr. Ir. RISBAR. N. R. G, S.Hut., M.Si NIP.19831130 201001 1 024	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PPTK
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK

NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
5.	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	MARZUKI ADAM, S.Kel NIP.19770328 200604 1019	Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembanguinan Manusia	PPTK
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
1.	Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK



NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
7.	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK
8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	ANDI RUMBIAH MANAJAI, S.P., M.M. NIP.19751031 200604 2 009	Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	PPTK



NO	KEGIATAN	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	NASRUDDIN T, S.E., M.Si NIP.19740719 201101 1 002	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	PPTK
2.	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	NASRUDDIN T, S.E., M.Si NIP.19740719 201101 1 002	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	PPTK
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	NASRUDDIN T, S.E., M.Si NIP.19740719 201101 1 002	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	PPTK
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
1.	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	NASRUDDIN T, S.E., M.Si NIP.19740719 201101 1 002	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah	PPTK

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA BAPPELITBANGDA,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198611 1 002

